

Ringkasan Eksekutif

INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA

Tahapan Pemilu Serentak 2024 sedang berlangsung. Beberapa tahapan krusial juga tengah berlangsung seperti penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dalam waktu dekat ini. Pada saat yang bersamaan, tahapan yang lain seperti pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga tengah berlangsung. Dalam konteks tahapan yang sedang berjalan ini, maka kehadiran Bawaslu RI sebagaimana mandat dalam UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa *“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”* adalah penting. Atas dasar inilah maka Bawaslu RI memiliki program unggulan yaitu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah berlangsung sejak tahun 2014.

Adapun definisi dari kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP sebagai berikut: *“segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”*. Berdasarkan definisi tersebut, IKP memiliki tiga tujuan utama yang ingin diraih yakni: (1) Memetakan potensi kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota; (2) Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan; (3) Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

Dalam IKP 2024 ini terdapat 4 dimensi yaitu (1) konteks sosial dan politik; (2) penyelenggaraan pemilu; (3) kontestasi; (4) partisipasi. Dalam setiap dimensi, ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruang lingkup yang terkait dengan hal tersebut. Dalam dimensi konteks sosial dan politik, ada tiga sub dimensi yang menjadi acuan yaitu keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara. Sementara itu, dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu dan pengawasan pemilu. Dimensi kontestasi terdiri dari dua subdimensi yaitu hak dipilih dan kampanye calon. Terakhir, dimensi partisipasi melingkupi dua subdimensi partisipasi memilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Dalam setiap subdimensi, terdapat beberapa indikator yang jumlahnya bervariasi satu dengan yang lain. Semisal subdimensi keamanan terdapat delapan indikator dan subdimensi hak memilih terdapat enam indikator. Sehingga terdapat 61 indikator yang menjadi pertanyaan dan pernyataan penting untuk dikumpulkan oleh setiap enumerator di daerah. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Ketika data yang dikumpulkan sudah dipenuhi, maka nilai dari setiap indikator dapat dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang

dibobot dengan tingkat kejadian yang ada. Sehingga nanti indikator-indikator yang menjadi penyusunan dimensi akan dihitung secara agregat untuk mendapatkan skor di masing-masing dimensi. Terakhir, skor akhir masing-masing IKP (provinsi dan kab/kota) merupakan penjumlahan dari skor dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dimensi yang ada.

Dalam proses pengumpulan data dan pengisian instrumen pertanyaan dan pernyataan IKP, ada dua hal yang dilakukan secara simultan, yaitu: pertama, IKP Provinsi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran di tingkat provinsi yaitu terkait pelaksanaan Pilkada serta pemilu legislatif di provinsi dan kewenangan yang dimiliki penyelenggara dan pengawas yang ada. Sehingga, skor IKP provinsi ini adalah hasil yang memang dikumpulkan dan diinput oleh para enumerator yang berasal dari Bawaslu tingkat provinsi. Sementara itu, skor IKP provinsi juga dapat dilihat dari agregat penilaian yang dilakukan oleh IKP Kabupaten/Kota. Dalam konteks itu, IKP provinsi dapat dilihat dengan dua jenis skor yang berbeda. Kedua, IKP Kabupaten/Kota untuk melihat gambaran di tingkat kabupaten/kota secara terpisah untuk pelaksanaan pilkada serta pemilu legislative. Sehingga, skor dari IKP Kabupaten/Kota dapat dilakukan sendiri dimana pengisian data tersebut berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, IKP 2024 terdiri dua yaitu IKP Provinsi dan IKP Kabupaten/Kota dimana temuan dan skor yang ada dapat terus berkembang mengikuti situasi dan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Laporan IKP 2024 ini adalah titik awal untuk mengidentifikasi kerawanan pemilu 2024 mendatang. Data pendukung dan informasi yang ada merupakan kejadian yang terjadi di tahun 2018-2020 di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota secara terpisah. Sehingga, temuan penting dalam IKP 2024 pada saat ini merupakan situasi berdasarkan refleksi dalam kejadian beberapa tahun silam yang menjadi rujukan dalam desain program pengawasan dan pencegahan Bawaslu RI. Selain itu, tentu dalam tahun 2023 mendatang, Bawaslu RI pun juga dapat mendorong pengumpulan data yang terbaru dalam tahapan-tahapan penting Pemilu di tahun 2023 dan 2024. Sehingga, Bawaslu RI dapat mengantisipasi kerawanan yang diproyeksikan terjadi dalam tahapan tertentu hingga tahap akhir Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024.

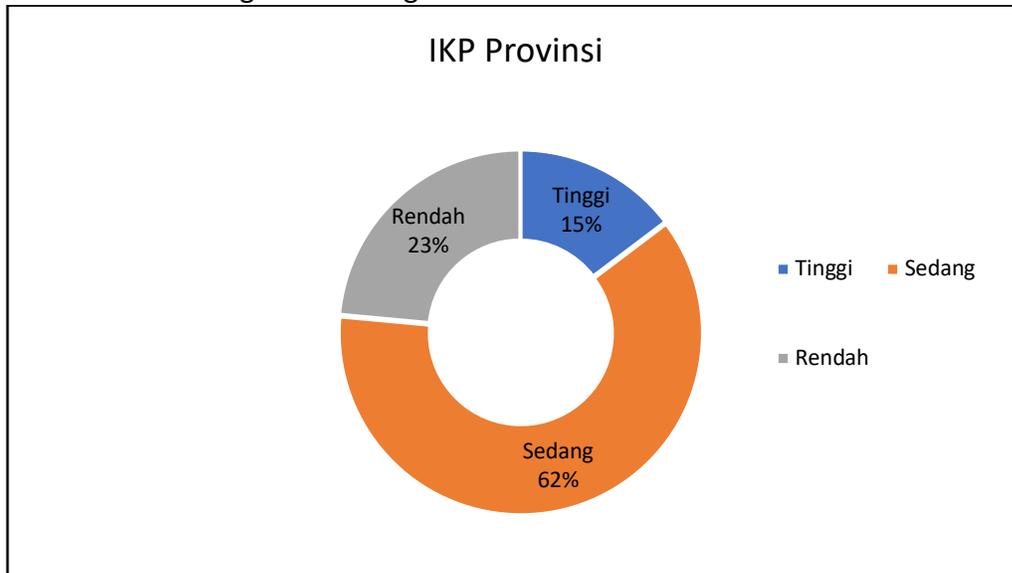
A. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi

1. Berdasarkan Isian Data Provinsi

Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27. Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.

Berdasarkan hasil olah data dari Bawaslu provinsi, pemetaan kerawanan tingkat provinsi menempatkan 5 provinsi (15%) dengan kategori rawan tinggi, 21 provinsi masuk dalam kategori rawan sedang (62%), dan 8 provinsi masuk dalam kategori rawan rendah. DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan skor 88,95 empat provinsi lain yang masuk dalam kategori rawan tinggi adalah Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

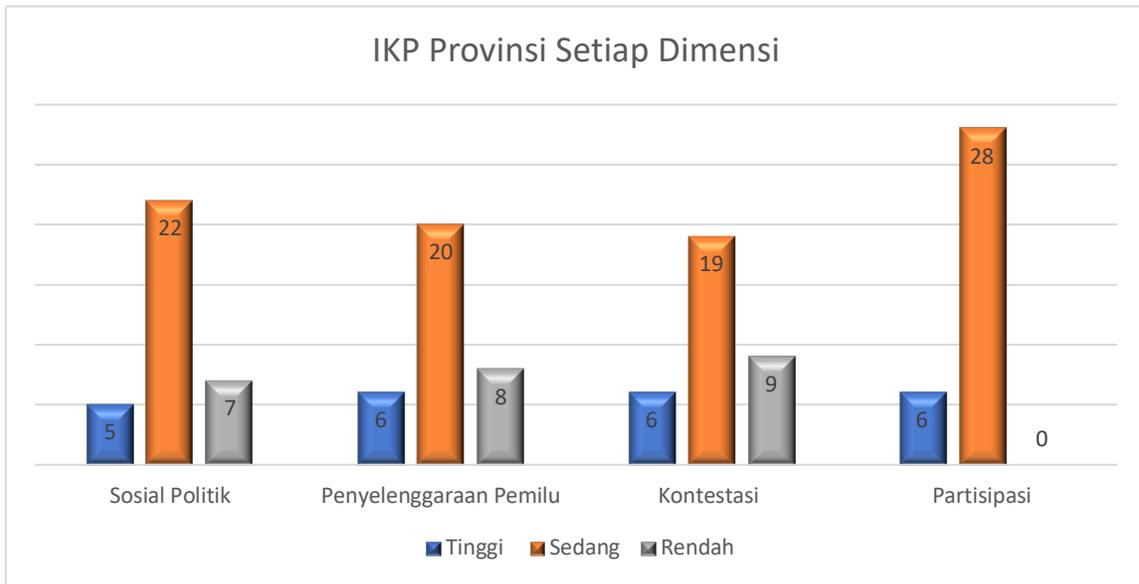
Diagram 1. Kategori Kerawanan Provinsi IKP 2024



Peta kerawanan pada masing-masing dimensi memiliki variasi tersendiri. Pada dimensi sosial politik sebanyak lima provinsi (14,71%) masuk dalam kategori kerawanan tinggi yaitu Maluku Utara (100), Sulawesi Utara (89.58), Papua, DKI (78,27), dan Yogyakarta (75,87). Sementara 22 provinsi (64,71%) termasuk dalam kategori kerawanan rendah, dan tujuh provinsi yang memiliki tingkat kerawanan rendah.

Dimensi penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi masing-masing memiliki enam provinsi (17,65%) yang termasuk dalam kategori kerawanan tinggi. Pada Dimensi Penyelenggara Pemilu 20 provinsi (58, 82%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan 8 provinsi (23,53%) memiliki tingkat kerawanan rendah. Pada Dimensi Kontestasi 19 provinsi (55,88%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan Sembilan provinsi (26,47) memiliki tingkat kerawanan rendah. Sementara pada dimensi partisipasi 28 provinsi (82,35%) memiliki tingkat kerawanan sedang dan tak ada satupun provinsi yang memiliki tingkat kerawanan rendah.

Diagram 2. Jumlah Kategori Kerawanan Provinsi IKP 2024 Setiap Dimensi



Enam provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan adalah Kalimantan Timur (100), Sumatera Utara (94,29), DKI Jakarta (92,36), Sulawesi Utara (91,60), dan Banten (89,43). Pada dimensi kontestasi Maluku Utara memiliki tingkat kerawanan paling tinggi (100) diikuti oleh DKI Jakarta (96,09), Lampung (89,30) Jawa Barat (83,71) Bangka Belitung (79,10), dan Sulawesi Utara (73,96) Sementara apda dimensi partisipasi, enam provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi adalah Sulawesi Utara (100), DKI Jakarta (87,01), Yogyakarta (87,01), Kepulauan Riau (87,01) Sulawesi Tengah (87,01) dan Papua (64,72)



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

1. Maluku Utara (100)
2. Sulawesi Utara (89,58)
3. Papua (80,53)
4. DKI Jakarta (78,27)
5. Yogyakarta (75,87)



PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Kalimantan Timur (100)
2. Sumatera Utara (94,29)
3. DKI Jakarta (92,36)
4. Jawa Tengah (91,67)
5. Sulawesi Utara (91,60)
6. Banten (89,43)



KONTESTASI

1. Maluku Utara (100)
2. DKI Jakarta (96,09)
3. Lampung (89,30)
4. Jawa Barat (83,71)
5. Bangka Belitung (79,10)
6. Sulawesi Utara (73,96)



PARTISIPASI

1. Sulawesi Utara (100)
2. DKI Jakarta (87,01)
3. Yogyakarta (87,01)
4. Kepulauan Riau (87,01)
5. Sulawesi Tengah (87,01)
6. Papua (64,72)

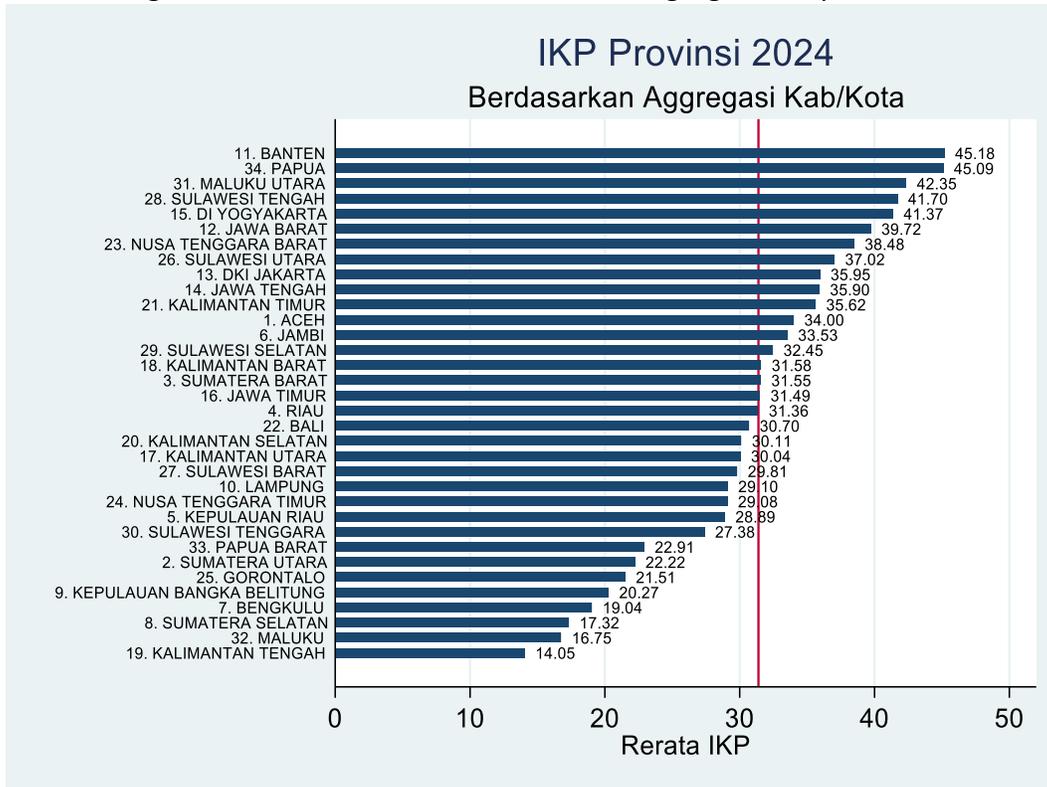
Tabel 1. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi

No	Provinsi	Kategori	Skor
1	DKI JAKARTA	TINGGI	88.95
2	SULAWESI UTARA	TINGGI	87.48
3	MALUKU UTARA	TINGGI	84.86
4	JAWA BARAT	TINGGI	77.04
5	KALIMANTAN TIMUR	TINGGI	77.04
6	BANTEN	SEDANG	66.53
7	LAMPUNG	SEDANG	64.61
8	RIAU	SEDANG	62.59
9	PAPUA	SEDANG	57.27
10	NUSA TENGGARA TIMUR	SEDANG	56.75
11	SUMATERA UTARA	SEDANG	53.69
12	MALUKU	SEDANG	53.48
13	PAPUA BARAT	SEDANG	53.35
14	KALIMANTAN SELATAN	SEDANG	52.90
15	SULAWESI TENGAH	SEDANG	52.75
16	BALI	SEDANG	45.44
17	GORONTALO	SEDANG	43.44
18	SULAWESI BARAT	SEDANG	43.02
19	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SEDANG	40.33
20	KEPULAUAN RIAU	SEDANG	39.68
21	SUMATERA BARAT	SEDANG	38.32
22	SULAWESI TENGGARA	SEDANG	38.06
23	ACEH	SEDANG	35.07
24	SUMATERA SELATAN	SEDANG	34.83
25	JAWA TENGAH	SEDANG	29.89
26	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	SEDANG	29.89
27	KALIMANTAN UTARA	RENDAH	20.36
28	KALIMANTAN TENGAH	RENDAH	18.77
29	JAWA TIMUR	RENDAH	14.74
30	KALIMANTAN BARAT	RENDAH	12.69
31	JAMBI	RENDAH	12.03
32	NUSA TENGGARA BARAT	RENDAH	11.09
33	SULAWESI SELATAN	RENDAH	10.20
34	BENGKULU	RENDAH	3.79

2. Berdasarkan Data Agregat Kabupaten/Kota

Sementara berdasarkan data agregat kabupaten/kota, 10 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi adalah Banten (45.18), Papua (45.09), Maluku Utara (42.35) Sulawesi Tengah (41.70), Yogyakarta (41,37), Jawa Barat (39,72), Sulawesi Utara (37,02). DKI Jakarta (35,95), Jawa Tengah (35,62).

Diagram 3. IKP Provinsi Berdasarkan Data Agregat Kabupaten/Kota



Pada dimensi sosial politik, 10 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi adalah Sulawesi Utara (55,67), Maluku Utara (48,56), Papua (46,60), Jambi (43,98), Sulawesi Tengah (43,45), Nusa Tenggara Barat (43,17), Sulawesi Barat (42,16), Sulawesi Selatan (38,95), Bali (38,02), dan Sulawesi Tenggara (36,79).

Pada dimensi Penyelenggaraan Pemilu Banten menjadi provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan skor 70,28. Sepuluh provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi secara berturut-turut menyusul Banten adalah Papua (55,09), Sulawesi Tengah (54,96), Jawa Tengah (54,58)(Jawa Barat (51,56), Aceh (50,04), Yogyakarta (49,54), Sulawesi Utara (49,17), Maluku Utara (48,69), dan Nusa Tenggara Barat (47,86).

DKI Jakarta menjadi Provinsi yang memiliki kerawanan paling tinggi pada dimensi kontestasi dengan skor 69,92. Sembilan provinsi lainnya menyusul DKI Jakarta yang menjadi 10 Provinsi dengan tingkat kerawanan paling adalah Yogyakarta (63,67), Maluku Utara (42,74), Jawa Barat

(38,70), Kalimantan Barat (37,91), Banten (36,50), Sulawesi Tengah (35,82), Papua (35,16), Nusa Tenggara Barat (34,27), dan Kepulauan Riau (33,95).

Sementara pada dimensi partisipasi, 10 provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi adalah Papua (24,08), Kalimantan Selatan (12,95), Kalimantan Barat (11,27), Kepulauan Bangka Belitung (8,30), Riau (7,69), Jawa Barat (6,22), Bali (5,67), Sulawesi Utara (4,88), Nusa Tenggara Timur (4,56), dan Kalimantan Utara (4,18)

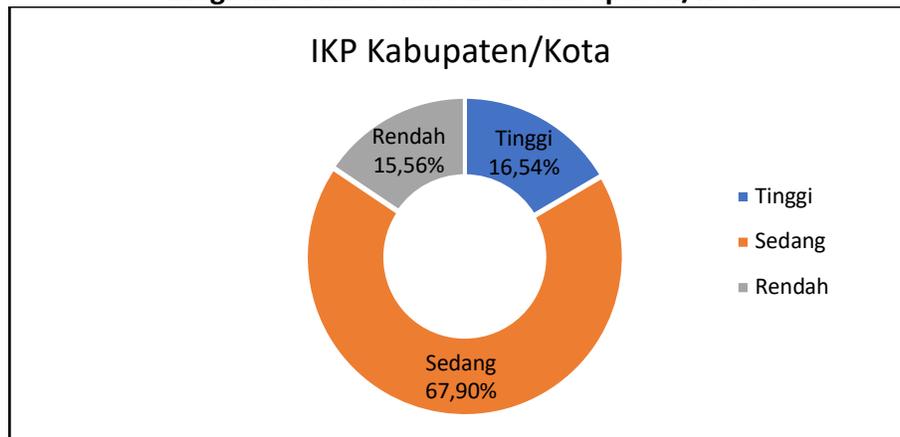
Tabel 2. 10 Provinsi dengan kerawanan tertinggi di setiap Dimensi

No	Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu	Kontestasi	Pertisipasi
1	Sulawesi Utara (55,67)	Banten (70,28)	DKI Jakarta (69,92)	Papua (24,08)
2	Maluku Utara (48,56)	Papua (55,09)	Yogyakarta (63,67)	Kalimantan Selatan (12,95)
3	Papua (46,60)	Sulawesi Tengah (54,96)	Maluku Utara (42,74)	Kalimantan Barat (11,27)
4	Jambi (43,98)	Jawa Tengah (54,58)	Jawa Barat (38,70)	Kep. Bangka Belitung (8,30)
5	Sulawesi Tengah (43,45)	Jawa Barat (51,56)	Kalimantan Barat (37,91)	Riau (7,69),
6	Nusa Tenggara Barat (43,17)	Aceh (50,04)	Banten (36,50),	Jawa Barat (6,22)
7	Sulawesi Barat (42,16)	Yogyakarta (49,54)	Sulawesi Tengah (35,82),	Bali (5,67)
8	Sulawesi Selatan (38,95)	Sulawesi Utara (49,17)	Papua (35,16)	Sulawesi Utara (4,88)
9	Bali (38,02)	Maluku Utara (48,69)	Nusa Tenggara Barat (34,27)	Nusa Tenggara Timur (4,56)
10	Sulawesi Tenggara (36,79)	Nusa Tenggara Barat (47,86)	Kepulauan Riau (33,95)	Kalimantan Utara (4,18)

B. Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten/Kota

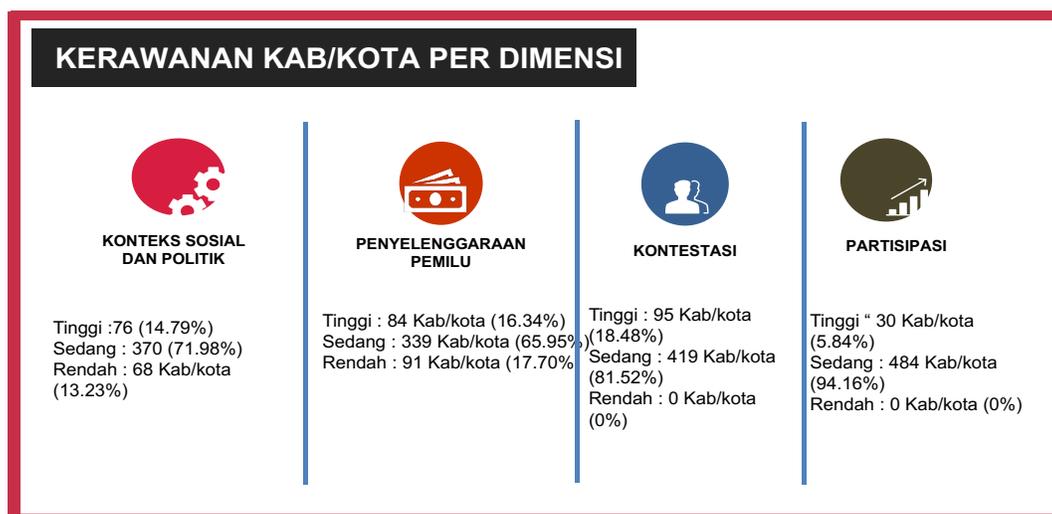
Indeks kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 juga memetakan tingkat kerawanan untuk setiap kabupaen/kota. Sebanyak 85 Kabupaten/Kota (16,54%) memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, 349 Kabupaten/Kota (67,90%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan 80 kabupaten/kota (15,56%) memiliki tingkat lerawanan yang rendah.

Diagram 4. IKP Pemilu 2024 Kabupaten/Kota



Tingkat kerawanan tertinggi untuk setiap dimensi memiliki variasi tersendiri. Pada dimensi konteks sosial politik 76 kabupaten/kota (14,79%) memiliki tingkat kerawanan tinggi, 370 kabupaten/kota (71,98%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan 68 kabupaten/kota (13,23%) memiliki tingkat kerawanan rendah. 84 kabupaten/kota (16,34%) memiliki tingkat kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu. Sisanya, sebanyak 339 kabupaten/kota (69,95%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan 91 kabupaten/kota (17,70%) memiliki tingkat kerawanan rendah.

Pada dimensi kontestasi 95 kabupaten/kota (18,48%) memiliki tingkat kerawanan tinggi, 419 kabupaten/kota (81,52%) memiliki tingkat kerawanan sedang, dan tidak ada kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan rendah. Demikian juga dengan dimensi partisipasi, tidak ada satupun kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan rendah. Sebanyak 30 kabupaten/kota (5,84%) memiliki tingkat kerawanan tinggi dan 484 kabupaten/kota (84,16%) memiliki tingkat kerawanan sedang.



Pemetaan IPK Pemilu 2024 untuk tingkat kabupaten/kota menunjukkan dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22. Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83.

Besarnya kontribusi dimensi penyelenggaraan pemilu terhadap potensi terjadinya kerawanan di pemilu ini tidak lepas dari subdimensi yang ada di dalamnya. Setidaknya ada lima sub dimensi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, yakni hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan, dan pengawasan pemilu. Dari kelima subdimensi ini, sebagian diantaranya tercatat paling banyak melahirkan masalah atau pelanggaran. Salah satunya adalah di subdimensi adjudikasi dan keberatan serta di subdimensi pelaksanaan pemungutan suara.

Pada dimensi penyelenggaraan pemilu juga menangkap potensi adanya penyelenggara pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan. Subdimensi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari upaya menguatkan profesionalitas penyelenggara pemilu. Sorotan publik terhadap proses verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu tidak bisa dilepaskan adanya ekspektasi yang besar publik pada penyelenggara pemilu yang netral dan profesional.

Tabel 3. Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Tinggi

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	49,38
34. PAPUA	KABUPATEN ASMAT	49,47
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	49,91
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	50,33
26. SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	50,65
12. JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	50,65
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONawe SELATAN	50,68
12. JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	51,10
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	51,17
12. JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	51,28
21. KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	51,49
26. SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	51,75
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	51,83
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	52,19
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	52,27
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	52,66
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	52,66
30. SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	52,73
18. KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	52,78
1. ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	53,03

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR
8. SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	53,19
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	53,25
11. BANTEN	KOTA SERANG	53,32
26. SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	54,04
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	54,21
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	54,25
34. PAPUA	KABUPATEN SARMI	54,34
10. LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	54,65
29. SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	54,69
27. SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	54,90
12. JAWA BARAT	KOTA BEKASI	55,48
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	55,76
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	56,21
34. PAPUA	KABUPATEN NABIRE	56,28
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	56,38
34. PAPUA	KOTA JAYAPURA	56,64
6. JAMBI	KABUPATEN KERINCI	57,42
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	57,52
1. ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	57,75
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	58,35
6. JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	58,67
11. BANTEN	KABUPATEN LEBAK	58,78
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	59,05
34. PAPUA	KABUPATEN NDUGA	59,55
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	59,65
34. PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	59,68
12. JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	59,93
33. PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	61,04
34. PAPUA	KABUPATEN MIMIKA	61,18
6. JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	61,18
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	61,23
1. ACEH	KABUPATEN PIDIE	61,80
10. LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	62,90
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	63,03
29. SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	63,19
34. PAPUA	KABUPATEN PUNCAK	63,23
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	63,40
3. SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	63,96
16. JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	64,01
31. MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	64,19

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR
15. DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	64,56
12. JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	64,79
34. PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	64,93
13. DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	65,14
12. JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	65,42
20. KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	65,52
1. ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	67,07
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	67,11
12. JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGA	67,14
23. NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	67,57
28. SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	67,72
14. JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	70,20
34. PAPUA	KABUPATEN TOLIKARA	72,51
14. JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	73,26
31. MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	75,30
24. NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	76,03
2. SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,29
11. BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	77,74
34. PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	78,05
20. KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	80,14
34. PAPUA	KABUPATEN MAPPI	82,13
34. PAPUA	KABUPATEN YALIMO	86,66
12. JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	91,59
34. PAPUA	KABUPATEN JAYAWIJAYA	100,00
34. PAPUA	KABUPATEN INTAN JAYA	100,00

C. Isu Strategis

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

2. Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.